

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta: Studi Kasus Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Nomor 1517 Tahun 2021.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori multi arus dari John W Kingdon. Teori ini sebagai pisau analisis dalam formulasi kebijakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah peran dari aktor seperti pakar, akademisi sebagai aktor pendukung dan peran Pemprov DKI Jakarta dan serikat pekerja/buruh sebagai aktor utama yang mendorong agar perubahan kebijakan mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Proses indentifikasi masalah terkait UMP DKI Jakarta merupakan bagian dari arus masalah, pihak Pemprov DKI Jakarta mencoba mengidentifikasi masalah mengenai UMP DKI Jakarta yang ternyata memang kenaikan yang dibawah kata layak. Pemprov mengidentifikasi bahwa upah selama enam tahun terkahir di DKI Jakarta rata-rata 8,6%, kemudian inflasi di DKI Jakarta sebesar 1,14%. Permasalahan tidak terlepas dari pihak serikat pekerja/buruh dengan melihat kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta ini sangat dibawah kata layak. Proses pemilihan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1% mengalahkan usulan daripada aktor lainnya. Proses ini merupakan bagian dari arus kebijakan, kenaikan 5,1% menunjukkan bahwa relasi kuasa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap pihak aktor lainnya yang tidak dapat mengintervensi keputusan yang dibuat oleh gubernur. Kenaikan UMP DKI Jakarta tidak terlepas dari arus politik yang memberikan tekanan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan oleh serikat pekerja/buruh.

Kata Kunci: upah Minimum provinsi, multi arus, formulasi kebijakan

**Determination of DKI Jakarta Provincial Minimum Wage (UMP) Increase:
Case Study DKI Jakarta Governor Anies Baswedan Decree Number: 1517
Year 2021**

Abstract

The purpose of this study is to discuss the Determination of the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage Increase: A Case Study of DKI Jakarta Governor Anies Baswedan's Decree Number 1517 of 2021.

The method used is descriptive qualitative. The main theory in this study is the multicurrent theory from John W Kingdon. This theory is used as an analytical tool in the policy formulation of DKI Jakarta Governor Decree Number 1517 of 2021 for the determination of the DKI Jakarta Provincial Minimum Wage of 2022.

The results of this study are the role of actors such as experts, academics as supporting actors and the role of DKI Jakarta Provincial Government and trade unions as the main actors pushing for policy changes regarding DKI Jakarta UMP in 2022. The process of identifying problems related to DKI Jakarta UMP is part of problem flow, the Provincial Government of DKI Jakarta tried to identify problems regarding the DKI Jakarta UMP which turned out to be an increase that was below what was said to be feasible. Pemprov identified that wages for the last six years in DKI Jakarta averaged 8.6%, then inflation in DKI Jakarta was 1.14%. The problem cannot be separated from the workers' unions by looking at the policy to increase the DKI Jakarta UMP which is very under the word feasible. The selection process for increasing the DKI Jakarta UMP to 5.1% defeated proposals from other actors. This process is part of the policy stream, the 5.1% increase indicates that the power relations exercised by DKI Jakarta Governor Anies Baswedan over other actors are unable to intervene in decisions made by the governor. The increase in the DKI Jakarta UMP is inseparable from political currents that put pressure on the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan which was carried out by trade unions.

Keywords: provincial minimum wage, multiple streams, policy formulation